

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubaupost.com

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Senin
03 Maret 2025

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

DPRD Busel Duga Pelantikan Birokrasi Yang Dilakukan Ridwan Badallah Tak Prosedural, Sekda Ada Dua



Pewarta: Hafis, Baubau Post, Durasi Times

BUSEL, BP-Dinamika pencopotan Sekda La Ode Budiman dan sejumlah pejabat di Buton Selatan oleh Pj Bupati Ridwan Badallah (RB) satu hari menjelang akhir masa jabatannya kembali memanas. Saling klaim jabatan terlihat pada apel pagi Senin (24/2/2025).

Mantan Sekda La Ode Budiman yang dicopot RB tetap memimpin apel pagi Senin. Awalnya Plh Sekda Jaudin pada awalnya memimpin apel

Lanjutkan ke Hal: 7

Melihat Tradisi Ramadan di Buton Selatan Mulai Dari Haroa Hingga Nyekar



Pewarta: Hafis

BUSEL, BP-Menjelang 1 Ramadan atau bulan puasa umat muslim diberbagai penjurur dunia merayakan penuh suka cita sebagai bulan penuh berkah. Tak terkecuali di Kabupaten Buton Selatan yang memiliki penduduk mayoritas muslim.

Meski penetapan 1 ramadan belum diputuskan pemerintah. Namun berbagai persiapan sudah nampak terlihat. Seperti yang terlihat di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Sejumlah warga bergotong royong mem-

Lanjutkan ke Hal: 7

Undur Diri Azhari Sebagai PNS Sah, PPHU Buton Tengah Ditolak MK, SAMA AZAN Bupati Buteng 2025-2030, La Andi Legowo, KPUD Sudah Lakukan Pleno Penetapan Calon Terpilih

Pewarta: Hengky TA

JAKARTA, BP- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah 2024 ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan dibacakan pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, dipimpin Ketua MK Suhartoyo serta delapan Hakim



Lanjutkan ke Hal: 7

Bupati Buton Utara Afirudin Mathara Bersyukur Bisa Perkuat Jaringan Ketika Retreat di Akmil Magelang Bisa Bertemu Rano Karno dan Hugua



Laporan: Amran

BURANGA, BP-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menyam-

paikan rasa syukurnya atas keikutsertaannya dalam Retreat Kepala Daerah dan Wakil Ke-

Lanjutkan ke Hal: 7

Menunggu Yusran-Hamsina Pulang Dari Retreat, Pj Sekda Baubau La Ode Aswad Ajak ASN Tetap Tingkatkan Kinerja



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos.M.Si saat memberikan arahan pada apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Baubau Palagimata Senin (24/2/2025) mengatakan, sebagaimana

Lanjutkan ke Hal: 7

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM
DIREKTUR



DPRD Busel Duga Pelantikan Birokrasi Yang Dilakukan Ridwan Badallah Tak Prosedural, Sekda Ada Dua

tiba-tiba diakhir apel itu kehadiran La Ode Budiman yang mengambil alih apel pagi.

Begitupun posisi kursi ruang kerja. Dua pejabat itu juga bersitegang. Mantan dua tahun Pj Busel yang juga Sekda Busel La Ode Budiman tetap bertahan di kursi jendral ASN Busel. Sedangkan Pj Sekda Busel Jaudin masih tetap di ruang kerja Asisten 3 Setda Busel.

Ketegangan pun muncul. Dua birokrasi itu saling klaim. Mempertontonkan dualisme Sekda birokrasi di pemerintah era baru pemerintahan Bupati H Muhammad Adios-

Wabub La Ode Risawal.

Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

"Kita sangat sayangkan terjadi seperti ini. Kami tidak ingin Busel ini ada kegaduhan seperti ini terus. Kami akan rekomendasikan kepada Bapak Bupati (baru) agar mengevaluasi kembali pelantikan sebelumnya," ujarnya saat menerima aspirasi

mahasiswa Gerakan Mahasiswa (Gema) Busel.

Dikatakan, pihaknya juga mendapatkan informasi persetujuan teknis (Pertek) dan izin yang diterbitkan Kemendagri terkait pelantikan pejabat di Busel hanya 13 orang. Tapi yang dilantik justru lebih dari jumlah itu.

"Ini jelas ada yang tidak sesuai prosedur," tegasnya.

Hingga berita ini dirilis belum ada jawaban resmi atau keterangan dari Bupati Busel H Muhammad Adios maupun Wabub Busel La Ode Risawal untuk konflik birokrasi yang diciptakan Pj Bupati Rid-

wan Badallah. Bupati Adios masih mengikuti Retret di Akademi Militer di Magelang sejak 21 hingga 28 Februari ini.

Ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) 100 hari kerja Bupati-Wabub Busel periode 2025-2030 diawal pemerintahannya. Konflik birokrasi di Busel tak ada ujungnya. Era sebelumnya juga pernah terjadi pelantikan birokrasi yang diduga juga tak prosedural.

Kini publik menanti solusi tegas Bupati dan Wabub Busel yang baru. Pun juga menanti program gebrakan solutif berkaitan dengan sejumlah persoalan krusial dan membudaya di Busel. (*)

Undur Diri Azhari Sebagai PNS Sah, PHPU Buton Tengah Ditolak MK, SAMA AZAN Bupati Buteng 2025-2030, La Andi Legowo, KPUD Sudah Lakukan Pleno Penetapan Calon Terpilih

Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Nomor Urut 02, La Andi dan Abidin. Sebagai Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah merupakan Termohon. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Nomor Urut 1, Azhari dan Muhammad Adam Basan menjadi Pihak Terkait.

"Mengadili, dalam pokok permohonan: Menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo.

Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. Termasuk di antaranya, soal status Calon Bupati Nomor Urut 1, Azhari sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalil Pemohon dinilai tidak beralasan hukum sebab melandaskan pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan tersebut mensyaratkan penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Namun menurut Mahkamah, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku karena dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam ketentuan yang berlaku, tidak terdapat adanya jangka waktu yang disyaratkan bagi pendaftar agar menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagai PNS. Pasal 26 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2024 justru membuka kesempatan bagi pendaftar yang belum memperoleh keputusan pemberhentian agar cukup menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran dini sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Terlebih dalam perkara ini, pemberhentian Azhari sebagai PNS telah disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 31 Oktober 2024. SK tersebut kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 15 November 2024.

Surat pemberhentian tersebut terbit sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah pada 27 November 2024. "Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan.

Mahkamah juga menolak dalil permohonan berkaitan dengan pemilihan pendatang yang terdata sebagai daftar pemilihan tetap (DPT). Di antara yang dipersoalkan Pemohon, adanya pemilihan bernama Wa Alumiya dan La In-

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Wabub La Ode Risawal. Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.

Bupati Buton Utara Afirudin Mathara Bersyukur Bisa Perkuat Jaringan Ketika Retreat di Akmil Magelang Bisa Bertemu Rano Karno dan Hugua

Kegiatan yang telah memasuki hari ketujuh ini menjadi ajang diskusi dan pembelajaran yang sangat berharga bagi para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Afirudin mengungkapkan kebanggaannya dapat berdiskusi dengan Ir. Hugua, mantan Bupati Wakatobi dua periode yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Baginya, kehadiran Hugua menjadi tambahan wawasan dan pengalaman dalam memahami dinamika kepemimpinan daerah.

Tak hanya itu, Afirudin juga bertemu dengan Rano Karno, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sosok yang dikenal

luas sebagai "Bang Doelâ€ ini memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan, mulai dari menjadi Wakil Gubernur Banten hingga Pelaksana Tugas Gubernur Banten sebelum akhirnya menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Diskusi semakin menarik dengan kehadiran Bupati Tapanuli Tengah, Mashinton Pasaribu, yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI dan memiliki latar belakang sebagai aktivis 98. Afirudin menilai, pengalaman dan gagasan yang disampaikan dalam forum ini sangat inspiratif, terutama dalam mendorong kemajuan daerah masing-masing.

"Retret ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperoleh materi

baru yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman antar kepala daerah. Inshaallah setelah mendapatkan pembekalan di AKMIL ini, kami akan terus berbagi informasi untuk kemajuan daerah masing-masing," tulis Afirudin Mathara dengan penuh semangat di akun Facebooknya, Kamis (27/2/2025).

Retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah ini menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat wawasan kepemimpinan, membangun jaringan kerja sama, serta menggali strategi pembangunan daerah yang lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat. (*)

Menunggu Yusran-Hamsina Pulang Dari Retret, Pj Sekda Baubau La Ode Aswad Ajak ASN Tetap Tingkatkan Kinerja

diketahui bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu Wali Kota dan Wakil Wali (Wawali) Kota Baubau periode 2025-2030 H Yusran Fahim, SE dan Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc telah selesai dilantik dan secara defakto dan dejure itu adalah Wali Kota dan Wawali semua.

Sehingga, walaupun pimpinan masih melaksanakan dinas luar daerah maka seluruh ASN untuk bekerja tetap melaksanakan dan meningkatkan sambil menunggu arahan-arahan lebih lanjut dari Wali Kota dan Wawali Baubau.

Oleh karena itu, hal-hal yang bisa di kerjakan sambil menunggu Wali Kota dan Wawali Baubau maka yang tugas-tugas rutin

tetap dilaksanakan seperti percepatan kegiatan, dan hal-hal yang prinsip agar dikoordinasikan secara berjenjang. Selain itu, juga menyiapkan diri sesuai Perpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran akan tetapi masih menunggu juknisnya dan tentu itu akan dikoordinasikan dengan Wali Kota dan Wawali sebelum melaksanakan di semua OPD.

"Mari kita dukung penuh untuk Wali Kota dan Wawali kita seperti Wali Kota yang lalu-lalu tetap ditingkatkan, jangan berfikir yang aneh-aneh dulu, tetap kita komitmen dan konsisten menjalankan tugas di masing-masing OPD," ujarnya.

Sementara itu, dalam

rangka menghadapi bulan suci ramadhan, Pemkot Baubau juga mempersiapkan diri dan juga sudah ada himbauan yang ditandatangani oleh Wali Kota Baubau tentang persiapan menghadapi bulan suci ramadhan.

Dengan menyambut bersama-sama tentu dengan terus bekerja dan masing-masing juga menyiapkan diri di OPD masing-masing. Dan khusus untuk para camat, Dinas Lingkungan Hidup, Sat Pol PP sesuai arahan Wali Kota Baubau saat zoom untuk memberi perhatian pada kebersihan lingkungan terutama baliho atau spanduk-spanduk yang tidak diperlukan lagi agar dilakukan penertiban dan pembersihan. (*)

agar dapur tetap mengesal jelang 1 ramadan.

Tradisi berdoa bersama atau haroa/baca-baca ini sudah umum dilaksanakan di masyarakat di Buton. Tak terkecuali di Busel. Sejumlah warga yang kerja atau mengenyam pendidikan daerah terdekat seperti di Kabupaten Buton maupun di Kota Baubau sekitarnya pulang kampung atau mudik. Merayakan awal ramadan atau haroa bersama.

"Kita penuhi kebutuhan mau haroa sebentar malam, jadi menu pangan lokal maupun kebutuhan lain seperti janur daun kelapa pisang, ubi, ayam, ikan wajib dihidangkan menjelang puasa besok. Ayam kita masak santan kuah campur daun kedondong, ikan wajib ada parende," ujar salah seorang ibu saat ditemui di pasar Mambulu, Kecamatan Sampolawa, padi tadi.

Tak hanya itu tradisi nyekar di makam leluhur atau berziarah juga dilaksanakan masyarakat di Busel. Nyekar di makam ini dilakukan sore hari jelang magrib. Seperti yang terlihat di TPU Majapahit, TPU Burukene Kecamatan Batauga.

Selain menunaikan ibadah puasa, umat Muslim juga memanfaatkan momen ini untuk memperdalam nilai-nilai spiritual, meningkatkan amal ibadah, dan mempererat hubungan sosial dalam keluarga maupun komunitas.

Seperti dikutip dari thenationalnews.com Jumat, (28/2/2025), berikut adalah rangkuman beberapa tradisi unik yang dijalankan selama bulan suci Ramadan dari Indonesia.

Nyekar, menjelang datangnya Ramadan ratusan umat Muslim di Indonesia berbondong-

bondong mengunjungi makam leluhur dan kerabat mereka untuk berziarah serta mendoakan arwah yang telah berpulang. Tradisi ini dikenal sebagai nyekar dan dilakukan dengan menaburkan kelopak mawar di atas makam serta melafalkan doa bagi mereka yang telah meninggal dunia.

Ritual ini bertujuan untuk mempererat ikatan keluarga sebagai bentuk persiapan menyambut salah satu bulan paling suci dalam Islam. Nyekar umumnya dilakukan sekitar satu minggu sebelum Ramadan dimulai. Meskipun tradisi ini banyak dijalankan oleh umat Muslim di Indonesia, terdapat kontroversi mengenai praktiknya. Beberapa kelompok yang lebih konservatif menganggapnya sebagai tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. (*)

Melihat Tradisi Ramadan di Buton Selatan Mulai Dari Haroa Hingga Nyekar

membersihkan pemukiman umum. Sebagian remaja masjid juga tampak antusias membersihkan masjid maupun halamannya.

Begitupun di Kecamatan Sampolawa maupun kecamatan lain. Sejumlah masjid sudah mulai tampak dipercantik, pemakaman keluarga maupun umum

dibersihkan. Tradisi ini sudah turun temurun/tradisi dilaksanakan tiap jelang bulan puasa maupun lebaran.

Sejumlah pasar di

wilayah Busel tampak ramai pengunjung. Paling banyak ibu-ibu untuk berbelanja kebutuhan untuk menu makanan dan masakan

Bupati Buton Utara Afirudin Mathara Bersyukur Bisa Perkuat Jaringan Ketika Retreat di Akmil Magelang Bisa Bertemu Rano Karno dan Hugua

Laporan: Kasrun

BUTUR, BP-Bupati Buton Utara (Butur), Afirudin Mathara, mengikuti retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Afirudin berada satu kompi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini menerapkan disiplin militer dengan jadwal ketat mulai pukul 04.20 WIB. Para peserta mengawali hari dengan ibadah subuh, dilanjutkan senam pagi dan bersih-bersih lingkungan. Setelah apel pagi, peserta mengikuti pembelajaran di Ruang Sudirman dan pembekalan di Lapangan Golf Borobudur Ak-



ASR berada satu kompi dengan Bupati Butur Afirudin Mathara

mil Magelang.

Sejumlah menteri memberikan pembekalan strategis terkait kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan kepada para kepala daerah. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 21.00 WIB.

"Program retreat ini dirancang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemimpin daerah. Kami juga mendapat kesempatan untuk melakukan refleksi dalam menjalankan tugas pemerintahan," ujar Afirudin.

Dengan agenda padat dan disiplin tinggi ala militer, diharapkan para peserta dapat menerapkan pengalaman serta wawasan baru di daerah masing-masing. (*)

24 Daerah PSU Pilkada, Komisi II Duga KPUD Ditipu atau Ikut Terlibat

Laporan: Hadi

JAKARTA-Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang mencapai di 24 daerah adalah hal yang mengejutkan.

Dia pun menduga KPU daerah selaku penyelenggara pemilu antara pura-pura tidak tahu dengan pelanggaran yang terjadi atau memang ditipu mentah-mentah oleh para peserta pilkada.

"Asumsinya ini mereka (KPUD) di bohongi sama kepala daerah dan benar-benar tidak tahu tapi MK (Mahkamah Konstitusi) bisa buktikan. Atau malah penyelenggara itu bagian dari konspirasi pelanggaran,

pura-pura tidak tahu lalu meloloskan. Mungkin ada bentuk komitmen atau transaksi apa, kita tidak tahu," ujar Doli usai diskusi di Sekretariat Politics and Colleagues Breakfast (PCB), Jakarta, Jumat (28/2).

Dia menilai PSU Pilkada 2024 merupakan yang terbanjak dalam sejarah. Menurutnya, putusan MK ini bisa memunculkan ketidakpastian pada sistem politik Indonesia, salah satunya dengan penyelenggara Pemilu 2024.

"Kaget karena saya kira ini dalam sejarah Indonesia paling banyak ini pemilu yang diulangi, total 15, kemudian ada 10 yang parsial," ucap Wakil Ketua Umum

Golkar itu.

Doli mengatakan dengan adanya PSU, maka ada puluhan daerah yang sampai saat ini tak punya kepala daerah definitif. Rakyat pun harus menanggung konsekuensinya.

Belum lagi, kata dia, anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk PSU Pilkada 2024 bisa mencapai Rp1 triliun.

"Jadi ini konsekuensinya sangat banyak, yang menanggung rakyat. Harus jadi evaluasi sistem politik kita," tuturnya.

Di lain sisi, dia juga mengaku kaget dengan putusan MK yang menetapkan PSU Pilkada 2024. Berdasarkan pemahaman Doli, dalam

undang-undang, MK hanya mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"MK sebetulnya adalah institusi yang mengadili PHPU. Tapi karena banyak kontestan politik Pilkada kemarin yang mengajukan permohonan sampai diskualifikasi, ya akhirnya mendorong mungkin PSU," kata Doli.

"Ini yang menurut saya harus menjadi evaluasi menyeluruh tentang penyelenggaraan pemilu atau tentang pemilu kita. Hal ini yang bakal rutin didiskusikan di Politics and Colleagues Breakfast atau PCB. Membahas evaluasi sistem politik Indonesia," imbuhnya. (*)

KPU Buteng Tetapkan Azhari dan Adam Basan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030, Azhari Beri Sambutan Lewat Zoom



Laporan: Hengky

BUTENG, BP-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030.

Rapat Pleno penetapan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Lakudo, Rabu (26/02/2025) pasca Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan tidak menerima (menolak) pokok permohonan pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati La Andi dan Abidin.

Dengan adanya hal tersebut, KPU Buteng menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Buteng tahun 2024 nomor urut 1 yakni Dr H Azhari S.STP, MSi dan Muhammad Adam Basan S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 27.11 suara atau 50,53 persen dari total suara sah se Kabupaten Buteng

Yang tertuang pada berita acara nomor 3/PL.02.7-

Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Andra Soni mengatakan bakal langsung menyusun program-program secara lebih tematik menyesuaikan arahan yang disampaikan melalui retreat.

"Kami sudah menyiapkan berbagai program dan Insya Allah program tersebut sudah termaktub dalam APBD yang sudah disusun oleh kawan-kawan sebelumnya. Cuma memang kami akan lebih tematik," kata Andra.

BA/7414/2025 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Buteng tahun 2024. Pada Kesempatan itu, Bupati Terpilih Azhari memberikan sambutannya melalui aplikasi zoom.

Ketua KPU Buteng, La Ode Abdul Jinani, saat dikonsolidasi mengatakan, bahwa setelah penetapan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPU akan segera menyerahkan dokumen penetapan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Setelah penetapan ini, sesuai ketentuan, kita akan menyerahkan langsung ke DPRD untuk menjadi kebutuhan persiapan mereka melakukan paripurna," ujar La Ode Abdul Jinani.

Lebih lanjut, La Ode menjelaskan bahwa setelah penyerahan ke DPRD, dokumen tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dalam waktu 5 hari setelah penetapan, kemudian proses paripurna di

DPRD, dan selanjutnya dokumen akan diajukan ke Kemendagri," tambahnya.

Namun, La Ode menegaskan bahwa proses selanjutnya akan kembali ke DPRD masing-masing untuk memastikan kelengkapan dokumen.

"Kami masih menunggu kelengkapan dokumen, dan besok kami akan menyerahkan ke DPRD untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur," jelasnya.

Penetapan pasangan Azhari dan Adam Basan ini diharapkan menjadi awal baru bagi pembangunan Buton Tengah, dengan harapan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Proses penyerahan dokumen ke DPRD dan Kemendagri diharapkan dapat berjalan lancar, sehingga pasangan terpilih dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah. (*)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Upacara Parade Senja dalam rangkaian retreat ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Retret ditutup dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto secara tertutup kepada para kepala-wakil kepala daerah serta para menteri. (*)

Ratusan Kepala Daerah Tinggalkan Lokasi Retreat Akmil Magelang

Laporan: Hasim

JAKARTA,- Ratusan kepala dan wakil kepala daerah mulai meninggalkan lokasi retreat di Akademi Militer (Ak-

mil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2) siang.

Para kepala dan wakil kepala daerah tampak mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam keluar dari lobi

Borobudur International Golf and Country. Sebagian dari mereka juga didampingi staf dan ajudan yang menjemput ke lokasi.

Beberapa kepala daerah yang terlihat

di antaranya Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Sleman Harda Kiswaya, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, dan

Tiba di Bandara Haluoleo, Gubernur ASR dan Wagub Hugua Disambut dengan Tarian dan Prosesi Adat dan Budaya Sultra



Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling, tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada Sabtu pagi, pukul 07.25 WITA. Kedatangan ini menjadi momentum penting setelah keduanya resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025, serta mengikuti retreat kepala daerah di Magelang yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Sesaat setelah turun dari pesawat, Gubernur dan Wakil Gubernur disambut dengan prosesi adat khas Sultra. Mereka menerima pengalangan bunga dari putra-putri pariwisata Sultra, disertai penyerahan

kampurui dan selempang adat Tolaki sebagai tanda penghormatan dan selamat datang.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Anggota DPR RI Komisi XIII Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra La Ode Taria, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kejati Sultra Dr. Hendro Dewanto, Kapengti Sultra Roki Panjaitan, Danlanal Kolonel Laut Adam Tjahja, Danlanud Kolonel Pnb Lilik Eko Susanto, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Selain itu, penyambutan semakin semarak dengan kehadiran Ketua Tim Pengendali dan Ketua Asistensi Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, serta tokoh

adat dari berbagai suku di Sultra, seperti Buton, Muna, Tolaki, Moronene, dan perwakilan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Beberapa tokoh masyarakat ternama, seperti Mashyur Masie Abunawas, Yusran Silondae, Hery Asiku, dan Abdurrahman Saleh, juga turut hadir dalam acara tersebut.

Setelah prosesi di bandara, Gubernur dan Wakil Gubernur melanjutkan perjalanan menuju Rumah Jabatan Gubernur dengan pengawalan ketat. Sepanjang perjalanan, warga menyambut dengan antusias, termasuk bariisan siswa sekolah yang melambaikan bendera kecil sebagai bentuk kegembiraan atas kepulangan pemimpin daerah mereka.

Setibanya di rumah jabatan, Gubernur dan Wakil

Gubernur kembali disambut dengan tarian adat dari empat etnis utama Sultra, yaitu Tari Mondotambe (Tolaki), Tari Lawati (Buton), Tari Kambawuna (Muna), dan Tari Lumense (Moronene). Keempat tarian tersebut dibawakan secara memukau oleh Sanggar Campuh Dona Jaya Kendari, menampilkan keberagaman budaya yang menjadi identitas Sulawesi Tenggara.

Kedatangan ini menjadi awal dari kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua dalam membangun Sulawesi Tenggara yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Antusiasme masyarakat menunjukkan harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini dalam membawa perubahan positif bagi daerah. (*)

Ini Agenda Penyambutan, Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wagub Sultra, hingga Rapat Paripurna

Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP-emerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sekda, Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph.D bersama Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi SIP., M.H., M.M, Jumat (28/2/2025) telah menggelar gladi bersih penjemputan Gubernur, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakilnya, Ir Hugua., M.Ling, yang dijadwalkan terlaksana pada Sabtu (1/3/2025).

Sekda Sultra mengatakan, selain penjemputan terdapat pula dua agenda penting lainnya yakni serah terima jabatan Gubernur dan Wagub Sultra

serta rapat paripurna, yang masing-masing digelar pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2025.

Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi SIP., M.H., M.M mengungkap, penjemputan yang dilakukan sebagai tanda bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur yang disambut merupakan Gubernur dan Wagub seluruh masyarakat Sultra.

Sebelumnya, persiapan penyambutan telah dilakukan dengan menggelar sejumlah rapat, mulai dari rapat perdana hingga rapat pemantapan termasuk gladi bersih, dimana Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph.D bersama Ketua Tim Pengendali Program Quick Win

ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi SIP., M.H., M.M melakukan pementauan secara langsung termasuk memastikan kesiapan secara teknis.

Selain Forkopimda beserta Istri, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Kajati, Kapengti, Kabinda, Danlanal, dan Danlanud, termasuk Sekda Sultra bersama istri, Ketua Tim Pengendali, Ketua Tim Asistensi Quick Win, dan Apdesi Sultra juga dipastikan mengundang kehadiran Tokoh Adat di Sultra.

Gubernur dan Wagub Sultra periode 2025-2030 berangkat dari Jakarta menuju Kota Kendari sekitar 01.55 WIB. Setibanya di Bandara Haluoleo langsung mendapat

kan penyambutan termasuk penyerahan kampurui dan Selempang Adat Tolaki serta Penyerahan Bucket Bunga.

Rencana agenda dilanjutkan dengan Rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030 tiba di Rujab Gubernur Sultra disambut oleh tarian empat etnis, serta para Staf Ahli serta Asisten Sekda dan Istri, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan istri/suami, FKUB, dan Paguyuban Adat.

Tidak berhenti di situ saja, agenda dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja oleh seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sultra yang bertempat di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, turut disaksikan oleh Forkopimda.

Gubernur Sultra Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja 2025



Pewarta: Lisna

SULTRA, BP-Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., didampingi Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, secara resmi menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 H/2025 M kepada seluruh masyarakat Muslim di Sultra. Beliau juga menekankan pentingnya acara ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat dengan penuh integritas dan dedikasi.

"Sejak saya dan Ir. Hugua dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030 oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025, kami berkomitmen menjalankan amanah yang dititipkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan ini. Semua elemen masyarakat harus bersatu untuk membangun Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik," ujar Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat

untuk menghilangkan sekat-sekat yang dapat menghambat pembangunan. "Kita harus menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu. Mereka telah membawa arah yang lebih baik, dan saya bersama Pak Hugua akan bekerja sekuat tenaga untuk masyarakat Sulawesi Tenggara," tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk Anggota DPR RI Komisi XIII Ali Mazi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua DPRD Sultra La Ode Taria, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kejati Sultra Dr. Hendro Dewanto, Kapengti Sultra Roki Panjaitan, Danlanal Kolonel Laut Adam Tjahja, Danlanud Kolonel Pnb Lilik Eko Susanto, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Turut hadir mantan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, Ketua Tim Pengendali dan Ketua Asistensi Quick Win ASR-Hugua Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, tokoh adat dari berbagai etnis di Sulawesi Tenggara, serta para pemuda dan masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Gubernur menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Ta-

hun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kementerian dan Pemerintah.

Tujuan dari penandatanganan ini meliputi:

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan prestasi aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aparatur.
3. Menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi.
4. Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran dalam tata kelola pemerintahan.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab. "Seperti pesan Pak Prabowo, jangan khianati mandat rakyat. Mari kita bekerja sekuat tenaga dengan kemampuan dan kewenangan yang ada demi membawa Sulawesi Tenggara lebih maju," tegasnya.

Beliau juga menegaskan bahwa kerja sama dengan semua pihak, termasuk para kepala dinas dan pegawai di seluruh tingkatan, sangatlah penting. "Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menyatukan pikiran, hati, dan kekuatan untuk membangun Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik," pungkasnya. (*)

Bertempat di Aula Serbaguna Rujab Gubernur Sultra, menjelang magrib agenda dilanjutkan dengan kultum, Buka Puasa Bersama, salat magrib berjamaah, perkenalan, Makan Malam Bersama, Salat Isya dan Tarawih berjamaah. Agenda ini turut dihadiri Forkopimda beserta Istri, Kepala Perangkat Daerah Beserta Istri/Suami, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.

Agenda Tanggal 2 Maret 2025 berupa Pengambilan Voice Over Ramadhan Tahun 2025 oleh RRI. Lalu Salat isya dan Tarawih Berjamaah

sekaligus Memberikan Ceramah. Terdapat pula agenda pembagian Sembako yang turut dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra.

Hari ke tiga, tepatnya tanggal 3 Maret 2025 apel pagi dirangkaikan dengan Pembagian 556 Sembako Kepada ASN Gol. I dan II dihadiri Kepala Perangkat Daerah dan Seluruh ASN Prov Sultra.

Usai itu, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra agenda dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Dimana Pj. Gubernur Sultra Periode 2023-2025, Komjen Pol. (P).

Dr.(H.C) Andap Budhi Reviyanto, S.I.K., M.H, direncanakan memberikan sambutan. Lalu penyerahan memori jabatan dan Sambutan Gubernur, Mayjen TNI Purn. Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua., M.Ling. Turut hadir Forkopimda, yakni Ketua DPRD, Kapolda, Danrem 143/HO, Kajati, Kapengti, Kabinda, Danlanal, Danlanud, Bupati dan Walikota, Instansi Vertikal, Kepala OPD, PKK dan Dharma Wanita.

Pada hari yang sama dilanjutkan dengan Rapat paripurna, dimana Ketua DPRD Provinsi Sultra akan memberikan Pidato Pengantar. (*)

Viral, Warga Siompu Gotong Royong Beli Delapan Ton Aspal Untuk Menambal Jalan Poros Yang Rusak, Perhatian Pemda Busel Dimana?



Pewarta: Hafis

BATAUGA--Penambalan jalan poros Siompu di Desa Tonggali dan Lapara oleh warga setempat menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Bagaimana tidak, warga bergotong royong menyumbang uang untuk membeli sekitar delapan ton aspal.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari terakhir ini. Sejumlah video warga yang melakukan perbaikan jalan secara gotong royong viral di media sosial.

Anggota Koramil 1413/07 Batauga, Sertu Ahmad Taufik yang ikut melaksanakan gotong

royong mengaku, warga secara gotong royong menambal sendiri jalannya yang rusak di daerah itu. Sertu Ahmad menyebutkan, penambalan jalan rusak itu sudah yang keempat kalinya selama 2 tahun terakhir. Jika sebelumnya penambalan dilakukan menggunakan semen, maka kali ini menggunakan aspal.

"Aspal ini dibeli dari hasil swadaya atau urunan masyarakat Siompu. Aspal yang dibeli sebanyak 8 ton. Dari 8 ton aspal tersebut, masyarakat berhasil menambal jalan poros Siompu sejauh 1 kilometer (Km) lebih," rilis yang dikirim ke media. Fakta lapangan jalan

poros Siompu di beberapa titik sangat parah kerusakannya, terutama di titik pendakian yang terjal. Parahnya pengguna jalan kadang harus berhenti untuk menunggu pengendaraan lain untuk lewat karena keadaan jalan dipendakian sangat parah. Bahkan sudah beberapa kali pengendaraan baik kendaraan roda dua ataupun roda empat mengalami kecelakaan.

Inilah yang membuat warga bergotong royong secepatnya melakukan perbaikan tanpa menunggu perhatian dari pemerintah daerah. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan di masyarakat selain air

bersih. Bukan hanya menjadi penghubung, juga sebagai mobilitas barang dan jasa serta akses ke layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. Sebelumnya juga sejumlah warga di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa melakukan kerja bakti padamu negeri menambal jalan secara swadaya masyarakat. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Busel dengan Kabupaten Buton ditambal oleh warga secara gotong royong.

Jalan itu juga menjadi akses mobilisasi ekonomi pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. (*)

Wakil Bupati Butur Rahman Perdana Pimpin Rapat Pembentukan Panitia Safari Ramadan 1446 H



Laporan : Kasrun

BURANGA, BP-Wakil Bupati Buton Utara Rahman memimpin rapat perdana bersama pimpinan OPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Sekretariat Daerah pada Selasa, 25 Februari 2025.

Rapat tersebut membahas persiapan serta pembentukan tim Safari Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di tingkat Kabupaten Buton Utara.

Dalam rapat ini, diputuskan bahwa tim Safari Ramadan akan dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing

dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Setiap tim akan didampingi oleh penceramah berpengalaman yang memiliki keahlian dalam dakwah Islam.

Dalam arahnya, Wakil Bupati Rahman menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai ibadah dan ukhuwah Islamiah dalam kegiatan Safari Ramadan. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak memiliki anggaran khusus, sehingga membutuhkan keikhlasan dari semua pihak yang terlibat.

"Pekerjaan apa pun yang didasari dengan keikhlasan pasti menghasilkan sesuatu yang baik, terlebih lagi jika

itu adalah kegiatan keagamaan seperti ini," ujar Rahman.

Setelah pengarahannya dari Wakil Bupati, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian saran dari peserta. Kepala Dinas Perumahan mengusulkan agar tim yang telah dibentuk dapat menjangkau desa-desa di setiap kecamatan yang dikunjungi. Hal ini mengingat masyarakat desa selalu menantikan kehadiran Tim Safari Ramadan dari kabupaten setiap tahunnya.

Rapat ini dihadiri oleh para pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten Buton Utara, serta perwakilan dari TNI dan Polri. (*)

Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan di Buton Utara Rendah, Samsat Akan Berkoordinasi dengan Pemda Butur Lakukan Razia

Laporan : Kasrun

BURANGA, BP-Kepala UPTB Samsat Buton Utara Askar mengungkapkan, realisasi capaian target pajak kendaraan tahun 2024 masih jauh dari optimal.

Berdasarkan data Samsat Online dan hasil rekapitulasi, dari total 10.168 unit kendaraan di Kabupaten Buton Utara, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih rendah di berbagai kategori.

"Untuk kendaraan pribadi yang mencapai 9.226 unit, hanya 2.504 unit atau sekitar 27,12% yang telah melunasi pajak. Kemudian kendaraan Dinas sebanyak 709 unit dan telah melunasi pajak sebanyak 306 unit atau sebanyak 43,22%, sedangkan kendaraan umum hanya 10,34%, dan kendaraan berplat luar yang berdomisili di Buton Utara baru 6,83%," jelas Askar saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, Rabu (26/2/2025).

Percepatan implementasi teknologi digital di desa diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung UMKM, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. 5. Sektor Prioritas Lainnya

Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendanai sektor-sektor prioritas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, seperti pendidikan, pemberday-



Kepala UPTB Samsat Buton Utara Askar

Ia menyoroti beberapa kendala utama dalam pencapaian target, seperti kurangnya pembaruan data kendaraan, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas petani dan nelayan, jarak kantor Samsat yang cukup jauh, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak kendaraan.

Sebagai solusi untuk optimalisasi penerimaan pajak di tahun 2025, Samsat Buton Utara akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempermudah akses pembayaran pajak bagi wilayah yang jauh dari kantor Samsat.

Selain itu, Askar juga menegaskan, kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajiban pajak akan dikawal melalui koordinasi dengan SKPD terkait.

"Melakukan sweeping atau razia kendaraan sebulan sekali," tambahnya.

Askar berharap dengan adanya kebijakan tambahan opsen pajak dan sistem bagi hasil ke daerah, serta langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat meningkat secara signifikan di tahun mendatang. (*)

DPMP Buton Selatan Gelar Evaluasi APBDesa 2025, Berikut Lima Skala Prioritas Membangun Desa

BUSEL, BP-- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025. Awal pekan ini difokuskan di Desa Bahari untuk 13 desa di Kecamatan Sampolawa.

Selanjutnya menyusul enam kecamatan lain dilakukan evaluasi APBDesa. Total 60 desa di Busel akan dilakukan evaluasi secara bertahap.

Kadis BPMDes Busel La Amirudin menyatakan, ini sangat perlu dilakukan sinkronisasi program maupun kesesuaian aturan yang berlaku.

"Pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana (ADD) yang telah melalui tahapan perumusan panjang bersama masyarakat Desa guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan. Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian dengan arah prioritas penggunaan DD berdasar peraturan yang berlaku," katanya.

Evaluasi APBDesa diawali di 13 Desa di Kecamatan Sampolawa, namun ada empat desa yang

belum siap. Empat desa itu dijadwalkan kembali di agenda evaluasi kecamatan lain. Sejak Rabu (27/2/2025) evaluasi di Kecamatan Lapandewa, menyusul Kadatua.

Sedangkan Kecamatan lain masih menunggu jadwal. Evaluasi APBDesa ini melibatkan pendamping desa kabupaten, kecamatan hingga desa. Begitupun dinas terkait maupun inspektorat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Menopang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2025 yakni

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Salah satu prioritas utama adalah alokasi maksimal sebesar 15% dari total Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dana ini ditujukan untuk

membantu masyarakat miskin ekstrem yang masih membutuhkan bantuan ekonomi, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

2. Ketahanan Pangan
Dana Desa juga dialokasikan paling rendah sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan di desa. Program ini meliputi kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pendistribusian bahan pangan yang mendukung kemandirian desa.

3. Dana Operasional Pemerintah Desa
Sebanyak 3% dari total Dana Desa dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa. Alokasi ini mencakup kegiatan administratif dan operasional lainnya yang menunjang pelayanan publik serta pengelolaan desa yang efektif dan efisien.

4. Pengembangan Potensi Desa dan Program Prioritas Lainnya
Dana Desa juga digunakan untuk mendukung berbagai program berikut:
- Peningkatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim Dana digunakan

untuk memperkuat desa dalam menghadapi perubahan iklim, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengendalian bencana.

- Promosi dan Layanan Kesehatan Dasar di Desa
Fokus pada penurunan angka stunting serta peningkatan akses layanan kesehatan untuk masyarakat desa.

- Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai
Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur desa yang memanfaatkan bahan baku lokal.

- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Desa Digital

Percepatan implementasi teknologi digital di desa diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung UMKM, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat.

5. Sektor Prioritas Lainnya
Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendanai sektor-sektor prioritas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, seperti pendidikan, pemberday-

yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kemandirian desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam setiap

tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar Dana Desa tepat sasaran dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat desa. (*)

Dorong Budaya Kerja Melalui Spirit Ramadan

Laporan: Yeti

JAKARTA-Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar kuliah umum bertajuk "Spirit Ramadan dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan". Acara ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme di lingkungan kerja, serta pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas dan antikorupsi di lingkungan Kemenkes yang sejalan dengan transformasi yang tengah dilakukan di sektor kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di auditorium Siwabessy gedung Prof. Sujudi pada Jumat (28/2/2025).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Fitroh Rochahyanto menegaskan pentingnya membangun budaya kerja antikorupsi melalui pendekatan agama. Ia menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih diri dalam melepaskan kemelekatan terhadap harta dan membangun kesadaran integritas.

"Ketika kita bicara puasa, sejatinya kita sedang berlatih untuk menahan diri dari segala bentuk kemelekatan, termasuk terhadap harta. Seorang yang bertakwa adalah mereka yang mampu berbagi, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain," ujar Dr. Fitroh di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Dr. Fitroh mengutip Surat Ali Imran ayat 134 yang menyebutkan bahwa salah satu tanda orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Menurutnya, prinsip ini juga harus diterapkan dalam etos kerja ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Fitroh menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, dengan menghindari sikap serakah dan mementingkan diri sendiri. Ia membagikan filosofi "IDOLA" sebagai prinsip kerja yang mencakup:

Integritas: Konsisten dalam ucapan dan tindakan.



Dedikasi: Memberikan pelayanan dengan totalitas.

Objektif: Netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi.

Loyalitas: Mengabdikan untuk kepentingan masyarakat.

Adil: Tidak memihak. Selain itu, Dr. Fitroh juga memperkenalkan konsep "Gatot Kaca", yakni prinsip kerja yang responsif, totalitas, komprehensif, dan penuh empati dalam melayani masyarakat. "Tanpa empati, kita tidak akan mampu memberikan pelayanan terbaik. ASN harus bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan tugas," tegasnya.

Sebagai penutup, Dr. Fitroh mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Ramadan sebagai waktu refleksi dalam meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual maupun profesional. "Latihan terbaik untuk menjadi pribadi yang bertakwa adalah dengan terus berbuat baik, berbagi, dan menumbuhkan keikhlasan dalam bekerja. Jika kita bekerja dengan niat yang benar, insyaAllah hasilnya akan berkah," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksiono Harbunono, menegaskan komitmen Kemenkes dalam meningkatkan budaya kerja yang berlandaskan integritas, loyalitas, dan pelayanan prima. Ia mengutip Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menegaskan pentingnya menjauhi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga budaya yang harus kita bangun bersama. Dengan pendekatan agama, kita

tidak hanya memperkuat regulasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pekerjaan kita," ujar Prof. Dante.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transformasi internal Kemenkes terus berjalan untuk mempercepat enam pilar transformasi kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan core values ASN BerAKHLAK guna menciptakan ekosistem kerja yang lebih transparan dan profesional.

Kegiatan ini juga menjadi momen refleksi menjelang bulan suci Ramadan, di mana nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja semakin ditekankan. Wamenkes mengajak seluruh pegawai Kemenkes untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan memperbaiki diri dan memperkuat integritas.

Sebagai penutup, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini, khususnya kepada KPK dan KORPRI Kemenkes. "Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua," tutupnya.

Sekretaris Jenderal yang turut hadir dalam sambutannya menegaskan, bahwa acara ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang lebih transparan dan berintegritas di Kementerian Kesehatan.

"Reformasi kesehatan yang kita lakukan, termasuk enam pilar transformasi kesehatan, tidak akan berhasil tanpa adanya reformasi internal di Kementerian Kesehatan. Kita harus mengubah mindset dari yang sebe-

lumnya berfokus pada kuratif ke promotif, dari pengobatan ke pencegahan, serta dari layanan kesehatan yang hanya terpusat di kota menjadi lebih merata ke daerah-daerah," ujar Sekjen Kunta.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kemandirian dalam sektor kesehatan, khususnya dalam produksi alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri. Namun, semua perubahan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya reformasi di tingkat internal, terutama dalam membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan antikorupsi.

"Hari ini, kita mendapat kesempatan luar biasa dengan kehadiran Pak Fitroh dari KPK yang memiliki pengalaman luas dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Ini adalah momen penting bagi kita untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan etos kerja," tambahnya.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Vertikal, Poltekkes, Balai Karantina Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Alat Kesehatan. Dengan cakupan yang luas, diharapkan diskusi ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh jajaran Kemenkes untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami berharap acara ini benar-benar membuka cakrawala kita semua dalam terus meningkatkan etos kerja serta membangun budaya kerja

DWP Manfaatkan "The Power of Emak-Emak" untuk Sosialisasikan Cek Kesehatan Gratis

Laporan: Warman

JAKARTA - Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ida Rachmawati Budi G. Sadikin menyampaikan komitmen organisasi ini dalam mendukung program pemerintah terkait cek kesehatan gratis. Program tersebut dihadirkan sebagai hadiah ulang tahun bagi seluruh warga negara Indonesia.

DWP bekerja sama dengan Seruni dan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Ida mengungkapkan bahwa kontribusi DWP bertujuan untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan lebih percaya diri.

Ia menekankan pentingnya kesehatan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa dan menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Menurutnya, anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi individu yang memiliki potensi besar dalam membangun negara.

"Ibu memiliki peran penting dalam keluarga, terutama dalam menjaga kesehatan dan pendidikan anak. Hampir 90% kontribusi ibu terhadap anak-anak, dan ini menjadi kunci bagi masa depan kita," ungkap Ida pada Webinar Sosialisasi Cek Kesehatan Gratis di gedung Kemenkes, Rabu (26/2).

Ia menambahkan bahwa peran ibu sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Ida juga mengajak seluruh ibu di Indonesia untuk bersama-sama menyebarkan informasi terkait cek kesehatan gratis ini.

Dengan "The Power of Emak-emak", kita dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat

yang bersih, transparan, dan dilakukan dengan hati. Karena hanya dengan itu, reformasi kesehatan yang kita jalankan dapat berjalan dengan sukses,"



sekitar kita," ujarnya.

Program cek kesehatan gratis yang disosialisasikan oleh DWP ini, diharapkan dapat menjangkau seluruh ibu di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan bantuan para ibu, informasi ini dapat tersebar lebih luas, membantu masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi kepada DWP dan para ibu yang telah mendukung program ini.

"Peranan ibu-ibu sangat besar. Tanpa dukungan mereka, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik," kata Budi dalam sambutannya.

Budi juga menyampaikan visi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, Budi menegaskan bahwa pendapatan per kapita warga negara Indonesia harus mencapai 14.000 dolar AS, sebuah peningkatan signifikan dari angka sekitar 4.800-5.000 dolar AS saat ini.

Menurut Budi, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat menjadi minimal Rp.18 juta per bulan agar dapat tercapai status negara maju. Saat ini, rata-rata pendapatan per bulan di Indonesia masih sekitar Rp.6 juta.

Menkes juga mengingatkan bahwa masa

depan Indonesia sangat bergantung pada periode puncak bonus demografi, yang diprediksi terjadi antara 2030 hingga 2035.

"Ini adalah periode penting di mana jumlah usia kerja di Indonesia mencapai puncaknya, dan kita harus memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat," jelasnya.

Budi menekankan bahwa kegagalan untuk memanfaatkan masa bonus demografi ini akan menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju.

"Jika kita gagal dalam periode ini, kita akan meninggalkan utang besar bagi generasi mendatang," tambahnya.

Puncak bonus demografi ini dianggap sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat, terutama dengan memastikan kualitas sumber daya manusia yang sehat. Oleh karena itu, Budi mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Selain itu, Budi juga mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi juga merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

"Kita harus bersama-sama memastikan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik," katanya.

Menkes Budi menegaskan bahwa menjaga kesehatan masyarakat merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan besar Indonesia Emas 2045. (*)

anan kesehatan, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (*)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post.
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna, Hafis, Harman Momi

Layouter : Rlirin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Kuasa Hukum: Kades Kohod Tak Tahu soal Denda Rp48 M, Tunggu Surat KKP



Pewarta: Alwan

JAKARTA-Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menanggapi persoalan hukuman denda administratif Rp48 miliar yang dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut kuasa hukum Arsin, Yunisar, sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar. Ia juga menuding sangkaan tersebut dipaksakan untuk menjerat kliennya.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP," ucapnya di Tangerang, Sabtu, seperti dikutip dari

Antara. Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang.

"Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga permohonan belum bisa banyak menanggapi," ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberita-

huan resminya. Kami tahu dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pem-

angunan pagar laut tersebut.

"Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam raker, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan aparat dari Bareskrim Polri dalam memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai jika ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut. "Itu ranahnya bukan di KKP," kata Trenggono. (*)

suran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, agenda sidang perdana Tom Lembong ini beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Berkas perkara Tom Lembong ini teregister dengan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst.

"Kamis, 6 Maret 2025, jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, agenda sidang pertama," mengutip laman resmi SIPP PN Jakpus.

Thomas Lembong menjadi tersangka

Kasus SHM Pagar Laut Bekasi Naik Penyidikan, Ditemukan Unsur Pidana



Polri akhirnya meningkatkan status perkara dugaan pemalsuan dokumen SHM di wilayah pagar laut Bekasi, Jawa Barat, ke tahap penyidikan.

Laporan: Hadi

JAKARTA - Bareskrim Polri akhirnya meningkatkan status perkara dugaan pemalsuan 93 dokumen sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Bekasi, Jawa Barat, ke tahap penyidikan. Polisi menemukan unsur pidana.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan peningkatan status berdasarkan alat bukti yang sudah dikumpulkan serta gelar perkara pada Kamis (27/2).

"Kemarin sore penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum telah melaksanakan gelar perkara

kami semua sepakat meningkatkan status LP tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/2).

Ia pun mengatakan penyidik akan mulai memanggil sejumlah saksi terkait untuk diperiksa dalam rangka pengumpulan alat bukti.

Selain itu, polisi juga tengah melengkapi berkas perkara untuk dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU) sebagai tanda dimulainya proses penyidikan.

"Melakukan pemeriksaan saksi, serta melaksanakan upaya-upaya paksa lainnya. Di mana kita akan juga masih menunggu tam-

bahan juga pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti," kata Djuhandhani.

Laporan soal dugaan pemalsuan dokumen SHM pagar laut Bekasi diterima dari Kementerian ATR/BPN pada Jumat (7/2).

Dalam kasus ini, Bareskrim juga menemukan adanya sertifikat tanah di wilayah pagar laut Bekasi, Jawa Barat, yang digadai kepada bank swasta. Dari temuan tersebut penyidik menduga para pelaku sudah mendapatkan keuntungan. (*)

Sidang Perdana Tom Lembong di Kasus Impor Gula Digelar 6 Maret



PN Jakarta Pusat akan gelar sidang perdana mantan Mendag Thomas Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Kamis (6/3).

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan meng-

gelar sidang perdana mantan Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Lembong dalam ka-

sus dugaan korupsi impor gula pada Kamis (6/3).

Mengutip Sistem Informasi Penelu-

ka dalam perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.

Kejagung sebelumnya melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Pelimpahan perkara Tom Lembong bersamaan dengan pelimpahan perkara tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Kepala Pusat Penyerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar sebelumnya mengatakan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat terkait proses pelimpahan.

Lebih lanjut, Harli memberikan klarifi-

kasi mengenai pembebanan uang pengganti.

Ia mengatakan, ada atau tidaknya pembebanan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Tom Lembong, hal tersebut akan dilihat dari surat dakwaan di pengadilan.

Kejagung Tak Bebankan Tom Lembong Bayar Kerugian Negara

"Karena ini masih berproses. Misalnya, apakah JPU mendakwakan yang bersangkutan menerima sesuatu? Ini, 'kan, harus diverifikasi lagi," ucap Harli.

Harli mengatakan apabila tersangka didakwa mendapatkan keuntungan dari kasus ini, maka akan ada kewajiban untuk membayar uang pengganti.

"Makanya, harus kita lihat dulu surat dakwaannya seperti apa. Ini lah nanti yang akan berproses sampai ini menjadi putusan," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan 11 orang tersangka, termasuk Tom Lembong dan Charles Sitorus.

Penyidik menilai keduanya telah melaksanakan importasi gula secara melawan hukum pada Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

Perbuatan mereka dianggap telah menguntungkan pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (*)

Lepas Tim Dakwa Ramadan 1446 H, Plh Sekda Baubau Abdul Karim Sampaikan Randown Penjemputan H Yusaran-Wa Ode Hamsina, Ini Agendanya

BAUBAU, BP-Plh Sekda Kota Baubau Abdul Karim, S.Pd, M.Si melepas secara resmi tim dakwah ramadan Kota Baubau 1446 H/2025 M di aula kantor Wali Kota Baubau Jumat (28/2/2025).

Dalam arahnya, Abdul Karim meminta kepada seluruh tim dakwah Kota Baubau untuk memberikan pencerahan-pencerahan keagamaan kepada jamaah di bulan suci ramadhan ini sehingga tentu diharapkan apa yang dilakukan dalam melaksanakan tugas menjadi nilai pahala yang Insya Allah



dibalas berlipat-lipat pahala oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Abdul Karim mengakui, pelepasan tim dakwah menjadi acara rutin setiap tahun bahwa menjelang lebaran membentuk tim dakwah ramadan

dan itu secara seremonial selalu dilakukan pelepasan oleh pimpinan daerah.

Namun demikian berhubung Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum ada di Baubau sehingga pihaknya diberikan amanah un-

tuk melepas secara resmi yang tentu tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai anggota tim dakwah ramadhan.

Sementara itu, Plh Sekda Kota Baubau

juga menyampaikan beberapa hal diantaranya informasi tentang Wali Kota Baubau H Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc yang sampai dengan saat ini masih berada diluar daerah sebab diketahui bersama setelah pelantikan tanggal 20 Februari 2025, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang.

Selanjutnya Wakil Wali Kota Baubau Ir H Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc dan berakhir pada 28 Feb-

ruari 2025. Sesuai dari Magelang, Wali Kota Baubau dan Wakil Wali Kota Baubau akan menghadiri acara serah terima jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari yang dijadwalkan nanti tanggal 3 Maret 2025.

"Dan direncanakan ke Baubau sesudah menghadiri acara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang waktunya masih tentative," tuturnya.

Pemkot Baubau, untkap Abdul Karim, secara internal sudah mempersiapkan acara penjempu-

tan dan selanjutnya sampai ke Rujab Wali Kota Baubau. Bahkan undangannya juga dipersilahkan bagi masyarakat Kota Baubau untuk menghadiri hajatan tersebut karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau sudah menjadi milik masyarakat sehingga pihaknya mengajak untuk memberikan dukungan didalam melaksanakan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau untuk membangun Kota Baubau lebih baik kedepan. (*)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MENGUCAPKAN



Dr. H Muh Ridwan Zakariah MS.i
Bupati Buton Utara

Ahali, SH. MH
Wakil Bupati Buton Utara

SELAMAT MEMPERINGATI



Muh Hadhy Muslim SH M.Si
Sekda Butur



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MENGUCAPKAN

SELAMAT ATAS PELANTIKAN



Afiruddin Mathara, SH.,MH
dan
Rahman SKM, M.Kes

SEBAGAI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
PERIODE 2025-2030

SERTA

TERIMAKASIH ATAS PENGABDIAN



Dr. H Muh Ridwan Zakariah M.Si

Ahali, SH. MH

SEBAGAI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA PERIODE 2021-2025



Muh Hadhy Muslim SH M.Si
Sekda Butur